

Kalbar Rugikan Negara Rp289,8 M

Sambungan dari halaman 1

Menurut Maulana, laporan ini merupakan cermin buruknya pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintahan provinsi di Indonesia. "Semua provinsi itu kita analisis. Kami melakukan perangkingan. Kalbar masuk 10 besar provinsi dengan kerugian negara cukup besar," katanya.

Angka 289,9 miliar adalah kerugian daerah di Kalbar selama kurun waktu 6 tahun yakni dari 2004 hingga 2010. Ada indikasi uang negara yang tidak dikembalikan ke negara. "Biasanya sebenarnya BPK dalam laporannya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk mengoreksi laporan keuangannya. Jika ada potensi keuangan negara yang hilang maka pemerintah daerah harus mengembalikannya ke kas negara. Jika tidak dikembalikan maka itu berpotensi merugikan negara," ujarnya.

Menurut Maulana, semestinya pengelolaan anggaran negara dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Sayang sekali jika uang sebesar itu hilang begitu saja. Jika digunakan untuk membangun sekolah sudah berapa bangunan selesai terbangun," katanya.

Maulana menyalahkan lem-

baga penegak hukum kerap tidak melanjutkan hasil laporan BPK ini. Padahal dalam undang-undang penegak hukum seperti Polisi dan Kejaksaan bisa melakukan penyelidikan berdasarkan laporan BPK tersebut.

Negara Rugi Rp4,1 Triliun

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan, banyaknya kerugian negara yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperlihatkan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah provinsi (pemprov) cenderung korup.

"Kerugian negara ini diketahui setelah Badan Pemeriksaan Keuangan memublikasikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) semester II Tahun 2011, dimana untuk 33 provinsi ditemukan kerugian negara sebesar Rp4,1 triliun (Rp.4.174.640.290.000) dengan kasus sebanyak 9.703," kata Uchok, dalam siaran persnya, Senin (1/10).

Berdasarkan data itu Sekretariat Nasional (Seknas) Fitra menyatakan, mencatat bahwa pemprov selama ini ternyata banyak mengabaikan hasil temuan audit BPK tersebut. "Lihat saja, 33 provinsi ini, semua menyimpan kerugian negara," tegasnya.

Ia menambahkan, dengan tidak memberitahu kepada pub-

lik memperlihatkan pembuat kebijakan ingin sembunyi dari rasa malu agar tidak menjadi sorotan rakyat sendirinya. "Atau rasa malu itu sudah hilang dalam batin dan hati para pembuat kebijakan sehingga kerugian negara ini dianggap biasa-biasa saja. Padahal total kerugian negara sebesar Rp4,1 triliun, pelan-pelan sebetulnya membunuh rakyat mereka sendiri," kata Uchok lagi.

Uchok menambahkan, dengan adanya kerugian negara sebesar Rp4,1 triliun ini memperlihatkan bahwa wakil rakyat di DPRD lumpuh sendiri. Karena, sambung dia, kelihatannya mereka bukan melakukan pengawasan terhadap eksekutif, tapi lebih bekerja sama dengan eksekutif untuk mencari materi dari Program-program APBD demi kebutuhan pribadi dan partai mereka.

"Dan selama ini, wakil rakyat kita bukan memerjuangkan aspirasi atau anggaran untuk rakyat miskin. Tapi lebih memerjuangkan anggaran untuk bikin kenyang para pembuat kebijakan seperti birokrat dan legislatif Lihat saja APBD provinsi, kadang-kadang disengaja boros, dan kadang-kadang juga dikorupsi," ujar Uchok.

Menanggapi masalah ini, aktivis anti korupsi dari lembaga Gemawan, Hermawansyah mengatakan, kejaksaan dan ke-

polisian bisa bergerak langsung untuk melakukan penyelidikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Namun temuan ini menurut Herwansyah perlu dilihat lagi apakah karena kesalahan administrasi terutama pada masalah standar akuntansi yang digunakan, atau memang ada penyimpangan dari penggunaan anggaran itu. "Jika kesalahan terkait status aset atau format akuntansi yang tidak standar, itu kan mudah. Berarti masalahnya ada pada sumberdaya yang menangani laporan keuangan itu. Tinggal kasih format yang benar dan peningkatan kapasitas SDM yang menulis laporan itu," katanya.

Tetapi jika kerugiaan keuangan yang ditemukan itu karena ada unsur penyelewengan keuangan, maka yang perlu dilakukan adalah upaya menindaklanjuti laporan itu. Apakah dengan audit investigasi. Audit ini dilakukan dengan tujuan tertentu untuk menggali lebih dalam mengenai penyimpangan yang terjadi.

Kejaksaan dan Kepolisian harus menjadikan laporan itu sebagai bukti permulaan untuk melakukan penyelidikan. "Tindak lanjut itu yang penting. Karena selama ini kan banyaknya temuan BPK itu jarang ditindaklanjuti," ujarnya. (her/ody)

Kalbar Rugikan Negara Rp289,8 M

■ Rangking Lima di Indonesia ■ Keuangan Provinsi Korup

PONTIANAK—Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengeluarkan rilis tentang provinsi penyumbang kerugian negara. Kalimantan Barat termasuk satu diantara 10 provinsi penyumbang kerugian negara tersebut, yakni sebesar Rp289,8 M. Tak tanggung-tanggung Kalbar menempati rangking kelima, diapit provinsi Papua dan Papua Barat.

Direktur Riset Fitra Muhammad Maulana mengatakan, laporan ini dianalisis berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK. "Kami merekap penggunaan dana yang dilakukan pemerintah provinsi dalam kurun waktu 2004 hingga 2010," kata Maulana yang dihubungi via

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

10 Daerah Terkorup di Indonesia & Penyumbang Kerugian Negara

| No | Provinsi | Kerugian Negara | Kasus |
|----|-------------------|-----------------|-------|
| 1 | Jakarta | Rp 721,5 miliar | 715 |
| 2 | Aceh | Rp 669,8 miliar | 629 |
| 3 | Sumatera Utara | Rp 515,5 miliar | 334 |
| 4 | Papua | Rp 476,9 miliar | 281 |
| 5 | Kalimantan Barat | Rp 289,8 miliar | 334 |
| 6 | Papua Barat | Rp 169 miliar | 514 |
| 7 | Sulawesi Selatan | Rp 157,7 miliar | 589 |
| 8 | Sulawesi Tenggara | Rp 139,9 miliar | 513 |
| 9 | Riau | Rp 125,2 miliar | 348 |
| 10 | Bengkulu | Rp 123,9 miliar | 257 |

Sumber: Analisis Fitra berdasarkan Laporan BPK/ Grafis: Heri Kuswanto